KALBIS Socio
Jurnal Bisnis dan Komunikasi

Kalbisocio, Jurnal Bisnis & Komunikasi,
Vol. 12, No. 3, September 2025, E-ISSN 2829-1301

Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan Dan Transparansi Informasi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Andi Aditya Hardinto[1], Faradilla Kusumaningrum[2], Aria Kesuma[3]

[1)]Akutansi, Fakultas Bisnis, Universitas Kalbis
Jl. Pulomas Selatan Kav. 22, Jakarta Timur 13210, Indonesia
e-mail: andiadityahardinto@gmail.com, andi.hardinto@kalbis.ac.id
[2)]Magister Akutansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta
[3)]Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta
Jl. Rawamangun Muka, RT.11/RW.14, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220, Indonesia
e-mail: faradillakusuma@gmail.com[2]
e-mail: postria05@gmail.com[3]

Abstract: *This study aims to analyze the effect of financial report quality and information transparency on regional financial performance, considering fiscal capacity as a control variable. Using a quantitative approach and multiple linear regression analysis, this study involves data from 10 major provinces in Indonesia during the 2020-2024 period. The results show that financial report quality, public information transparency, and fiscal capacity significantly affect regional financial performance. The regression model explains 92.4% of the variation in regional financial performance ($R^2 = 0.924$), making this model very strong statistically and empirically. These findings strengthen the importance of transparent and accountable regional financial governance and consider fiscal capacity as a strategic factor in improving performance.*
Keywords: *Financial reporting, information transparency, fiscal capacity, regional financial performance, multiple regression.*

Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas laporan keuangan dan keterbukaan informasi terhadap kinerja keuangan daerah, dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal sebagai variabel kontrol. Menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis regresi linier berganda, penelitian ini melibatkan data dari 10 provinsi besar di Indonesia selama periode 2020-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan, keterbukaan informasi publik, dan kapasitas fiskal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Model regresi yang digunakan menjelaskan sebesar 92,4% variasi kinerja keuangan daerah ($R^2 = 0,924$), menjadikan model ini sangat kuat secara statistik dan empiris. Temuan ini memperkuat pentingnya tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta memperhitungkan kapasitas fiskal sebagai faktor strategis dalam meningkatkan kinerja.
Kata Kunci: Laporan keuangan, transparansi informasi, kapasitas fiskal, kinerja keuangan daerah, regresi berganda.

I. PENDAHULUAN

Dorongan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) semakin menguat dalam dua dekade terakhir. Pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya efektif dan efisien dalam menggunakan anggaran, tetapi juga transparan dan akuntabel kepada publik. Dalam konteks ini, kualitas laporan keuangan dan keterbukaan informasi publik menjadi dua pilar utama yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel.

Laporan keuangan yang berkualitas, yaitu yang memenuhi unsur keandalan, relevansi, konsistensi, serta disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), merupakan alat penting untuk menilai dan mengendalikan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Di sisi lain, keterbukaan informasi publik tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga strategi untuk memperkuat partisipasi publik, pengawasan sosial, dan legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua daerah berhasil mengimplementasikan dua aspek tersebut secara merata. Masih ditemukan

kesenjangan antar provinsi dalam hal opini BPK terhadap laporan keuangan, keterlambatan penyampaian laporan, serta rendahnya nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di sejumlah wilayah.

Sebagian besar pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam menyajikan laporan keuangan yang memenuhi standar serta dalam memenuhi kewajiban keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Padahal, daerah-daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur merupakan wilayah dengan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional dan memiliki anggaran belanja yang signifikan. Oleh karena itu, kualitas pengelolaan keuangan daerah menjadi isu yang sangat penting.

Gambar 1. Kontribusi dan Pertumbuhan Menurut Wilayah

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan memiliki hubungan positif terhadap kinerja keuangan daerah. Febrianti et al. (2021) mengungkapkan bahwa laporan keuangan dengan opini WTP dari BPK berkontribusi pada peningkatan efektivitas belanja dan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hanif et al. (2023) menambahkan bahwa sistem pengendalian internal yang baik memperkuat kualitas pelaporan keuangan dan mendorong akuntabilitas fiskal. Dalam aspek transparansi, penelitian oleh Saputri et al. (2024) menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi birokrasi dan memperbaiki kinerja institusi publik. Desmalita dan Setyadi (2025) juga menekankan bahwa keterbukaan informasi memiliki korelasi positif dengan indeks kinerja pemerintahan daerah.

Namun demikian, sebagian besar studi sebelumnya belum secara khusus mempertimbangkan peran kapasitas fiskal sebagai variabel kontrol yang berpotensi memengaruhi hubungan antara pelaporan, transparansi, dan kinerja. Padahal, kapasitas fiskal merupakan cerminan sejauh mana suatu daerah mampu membiayai kebutuhan dan prioritas pembangunan dari sumber daya keuangannya sendiri. Kapasitas fiskal yang rendah dapat menjadi kendala dalam menyediakan sistem pelaporan dan infrastruktur informasi publik yang baik, sekalipun komitmen tata kelola telah ada.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memfokuskan perhatian pada tiga variabel utama: kualitas laporan keuangan, keterbukaan informasi publik, dan kapasitas fiskal, serta bagaimana ketiganya memengaruhi kinerja keuangan daerah di Indonesia.

Permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah?
2. Apakah keterbukaan informasi publik berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah?
3. Bagaimana pengaruh simultan antara kedua variabel tersebut terhadap kinerja keuangan daerah? Dan;
4. Sejauh mana kapasitas fiskal berperan dalam memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut?

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara empiris pengaruh kualitas laporan keuangan dan keterbukaan informasi publik terhadap kinerja keuangan daerah, baik secara parsial maupun simultan, serta menilai peran kapasitas fiskal sebagai variabel kontrol yang dapat memoderasi hubungan antar variabel utama tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan sistem tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kapasitas fiskal daerah.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif-

verifikatif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menggambarkan serta menguji pengaruh antara variabel-variabel yang telah ditentukan secara empiris, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan daerah. Desain penelitian yang digunakan adalah korelasional dengan model regresi linier berganda untuk mengukur pengaruh simultan dan parsial antar variabel.

Selanjutnya pendekatan teori yang digunakan adalah, Teori Keagenan (Agency Theory) dan Teori Akuntansi Publik. Teori Keagenan, sebagaimana dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa dalam hubungan kontraktual antara masyarakat sebagai principal dan pemerintah daerah sebagai agent, dibutuhkan transparansi informasi untuk meminimalkan asimetri informasi dan meningkatkan akuntabilitas. Sementara itu, Teori Akuntansi Publik menurut Anthony dan Young (2003) menekankan pentingnya sistem pelaporan keuangan yang akurat dan terbuka sebagai sarana kontrol publik terhadap kinerja sektor publik.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pemerintah provinsi di Indonesia yang berjumlah 38 provinsi. Adapun pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan memilih 10 provinsi besar berdasarkan kontribusi fiskal dan kompleksitas pengelolaan keuangannya, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali. Periode observasi meliputi tahun 2020 hingga 2024.

Variabel independen terdiri dari Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (X1) dengan indikator opini BPK, ketepatan waktu penyampaian, dan kesesuaian dengan SAP, serta Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (X2) dengan indikator nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) dan ketersediaan informasi keuangan. Variabel dependen adalah Kinerja Keuangan Daerah (Y) yang diukur melalui efektivitas PAD, efisiensi belanja, proporsi belanja modal, dan pertumbuhan PAD. Variabel kontrol adalah Kapasitas Fiskal Daerah (Z) yang dilihat dari rasio PAD terhadap total pendapatan dan indeks kapasitas fiskal versi Kemendagri.

Sumber data diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, laporan tahunan Komisi Informasi Pusat, data APBD dan LKPD dari Kementerian Keuangan, serta indeks kapasitas fiskal dari Kementerian Dalam Negeri. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan model: $Y = \beta0 + \beta1X1 + \beta2X2 + \beta3Z + \varepsilon$, yang diolah menggunakan Microsoft Excel.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Pengujian Statistik

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh kualitas laporan keuangan (X□), keterbukaan informasi publik (X□), dan kapasitas fiskal sebagai variabel kontrol (Z) terhadap kinerja keuangan daerah (Y). Pengujian dilakukan terhadap data dari 10 provinsi besar di Indonesia selama periode 2020–2024.

a. Uji T

Hasil uji T menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen. Ringkasan hasil uji T disajikan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Hasil Regresi

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Stat	p-Value
Kualitas Laporan Keuangan (X_1)	0,2825	0,1244	2,271	0,029
Keterbukaan Informasi (X_2)	0,1230	0,0539	2,282	0,029
Kapasitas Fiskal (Z)	0,6285	0,0462	13,605	0,000

Sumber: Data diolah Peneliti

Nilai p-value seluruh variabel < 0,05, menunjukkan bahwa masing-masing variabel secara signifikan memengaruhi kinerja keuangan daerah. Kapasitas fiskal memiliki pengaruh paling dominan dengan t-statistik tertinggi.

b. Uji F

Hasil uji F menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan.

F-Statistik = 144,98 dan p-Value < 0,0001 artinya, kualitas laporan keuangan, keterbukaan informasi publik, dan kapasitas fiskal secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Model regresi ini memiliki koefisien determinasi sebesar R^2 = 0,924 atau 92,4%. Artinya, 92,4% variasi dalam kinerja keuangan daerah dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen yang digunakan dalam model. Sisanya, 7,6%, dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

d. Persamaan Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, diperoleh persamaan model sebagai berikut:

$$Y=-0,0218+0,2825X1+0,1230X2+0,6285Z+\epsilon$$

Dalam persamaan tersebut, Y merepresentasikan kinerja keuangan daerah, X1 adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, X2 merupakan tingkat keterbukaan informasi publik, dan Z adalah kapasitas fiskal sebagai variabel kontrol. Sementara itu, ε menggambarkan faktor kesalahan atau variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Koefisien regresi sebesar 0,2825 pada variabel kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa jika kualitas laporan keuangan meningkat satu satuan (misalnya peningkatan opini BPK atau ketepatan waktu penyampaian), maka kinerja keuangan daerah cenderung meningkat sebesar 0,2825 satuan, dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Sementara itu, koefisien 0,1230 pada variabel keterbukaan informasi publik menunjukkan bahwa peningkatan transparansi informasi publik, seperti perbaikan skor IKIP atau ketersediaan data keuangan daring, akan meningkatkan kinerja keuangan daerah sebesar 0,1230 satuan, *ceteris paribus*.

Adapun variabel kapasitas fiskal menunjukkan koefisien terbesar, yaitu 0,6285, menandakan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah (yang mencerminkan kemampuan pembiayaan dari sumber internal seperti PAD) memiliki pengaruh paling kuat terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah. Ini menegaskan bahwa kapasitas fiskal merupakan pondasi utama dalam mendukung efektivitas pelaporan dan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Secara keseluruhan, arah hubungan ketiga variabel independen terhadap variabel dependen adalah positif, yang berarti semakin tinggi kualitas laporan keuangan, transparansi informasi, dan kapasitas fiskal suatu daerah, maka semakin baik pula kinerja keuangannya. Hal ini menguatkan bahwa tata kelola keuangan yang baik harus dibangun di atas kombinasi integritas pelaporan, transparansi informasi, dan kemandirian fiskal.

3.2 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Febrianti et al. (2021) yang menyatakan bahwa laporan keuangan yang baik (dengan opini WTP dari BPK) memiliki korelasi kuat terhadap efektivitas belanja dan peningkatan PAD. Hanif et al. (2023) juga menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang baik menghasilkan laporan yang lebih transparan dan dapat dipercaya, yang mendorong akuntabilitas fiskal.

Keterbukaan informasi publik terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini mendukung temuan Saputri et al. (2024) yang menekankan bahwa transparansi memperkuat partisipasi publik dan meningkatkan efisiensi kinerja birokrasi. Desmalita dan Setyadi (2025) juga menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik berkorelasi dengan peningkatan indeks kinerja pemerintah daerah.

Kapasitas fiskal menunjukkan pengaruh yang paling dominan dalam model penelitian. Hal ini mengonfirmasi pentingnya kemampuan fiskal sebagai fondasi dalam pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik. Daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat memiliki sumber daya yang memadai untuk berinvestasi dalam sistem pelaporan keuangan yang berkualitas dan infrastruktur keterbukaan informasi yang memadai.

Kombinasi ketiga variabel ini menciptakan sinergi yang kuat dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah. Laporan keuangan yang berkualitas dan

keterbukaan informasi yang baik akan lebih efektif jika didukung oleh kapasitas fiskal yang memadai. Sebaliknya, kapasitas fiskal yang besar tanpa didukung transparansi dan kualitas pelaporan yang baik tidak akan optimal dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan, keterbukaan informasi publik, dan kapasitas fiskal secara signifikan memengaruhi kinerja keuangan daerah. Model regresi yang digunakan sangat kuat dengan nilai R^2 sebesar 92,4%, menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan sebagian besar variasi dalam kinerja keuangan daerah. Kapasitas fiskal menjadi faktor yang paling dominan dalam memengaruhi kinerja keuangan daerah, diikuti oleh kualitas laporan keuangan dan keterbukaan informasi publik.

Temuan ini memperkuat literatur sebelumnya dan menegaskan pentingnya reformasi tata kelola publik berbasis transparansi dan efisiensi fiskal. Integrasi antara kualitas teknis pelaporan, dukungan sistem informasi yang transparan, dan strategi fiskal yang kuat menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah daerah: pertama, menetapkan indikator pengukuran kinerja keuangan daerah berbasis transparansi dan akuntabilitas, selanjutnya menyusun standar operasional prosedur (SOP) untuk penyusunan laporan keuangan dan penyajian informasi publik, kemudian melakukan audit internal secara berkala untuk menilai efektivitas pelaporan dan keterbukaan informasi, serta terus menyesuaikan kebijakan penganggaran dengan kapasitas fiskal riil daerah melalui instrumen fiskal yang adaptif.

Penelitian lanjutan direkomendasikan untuk mengeksplorasi pengaruh variabel moderasi lain seperti pengawasan legislatif dan partisipasi masyarakat dalam konteks yang lebih luas.

DAFTAR RUJUKAN

Aguspita, M. (2019). Pengaruh SIAKD dan pengawasan terhadap transparansi dan akuntabilitas. *Jurnal Akuntansi Daerah*, 88-99.

Anthony, R. N. (2003). anagement control in nonprofit organizations . *McGraw-Hill.*, (7th ed.).

Ariyo-Edu, A. A. (2023). Influence of accountability and transparency on operational performance of public sector. *International Journal of Public Administration,*, 46(5), 479-495.

Askim, J. &. (25(3), 357-373.). Performance management and accountability: The role of intergovernmental information systems. *Public Management Review*, 2023.

Desmalita, W. &. (2025). The effect of transparency and accountability on local government performance. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 1-12.

Febrianti, R. e. (2021). Pengaruh kualitas laporan keuangan, kapasitas SDM, dan SPI terhadap kinerja keuangan Pemda. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 6(2), 77-89.

Florini, A. (2007). he right to know: Transparency for an open world. *Columbia University Press.*

Hanif, M. e. (2023). Disclosure level of local government's financial statements in Indonesia. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 9(1), 15-30.

Indonesia., B. P. (2020-2024). *Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah.*

Indonesia., K. D. (2020-2024). *Indeks kapasitas fiskal daerah.* .

Indonesia., K. I. (2020-2024). *Laporan tahunan indeks keterbukaan informasi publik (IKIP).*

Indonesia., K. K. (2020-2024). *Data APBD provinsi dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).*

Jensen, M. C. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. . *Journal of Financial Economics,*, 3(4), 305-360. .

Munawir, M. &. (2021). Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan daerah. . *Jurnal Ilmu Administrasi,* , 8(2), 101-112.

Palembangan, S. K. (2022). The influence of community competency, organizational commitment, and participation on the accountability of village fund management in North Toraja District. *Journal of Public Sector Economics,*, 4(3), 145-156.

Saputri, D. R. (2024). Determinants of transparency of local government financial reports in Indonesia. *Jurnal Transparansi Keuangan Daerah,* , 11(1), 33-48.

Yuniar, M. R. (2023). The transparency level of local governments in Indonesia: Does the level of financial health matter? . *Journal of Financial Accountability in the Public Sector,* , 5(1), 21-34.